KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp.6221-3925230 Fax.6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, 6 Juni 2016

Nomor : 171/S.0.0.3/VI/2016
Perihal : Rencana Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Renja Komnas HAM) Tahun 2016
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth,
1. Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu RI;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas;
3. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bappenas.

Di-
Jakarta

Sehubungan dengan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, maka dengan ini kami menyusun Rencana Kerja Komnas HAM Tahun 2017 berdasarkan alokasi Pagu Indikatif Kementerian/ Lembaga Tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :

(*dalam juta rupiah*)

Kode Kegiatan	**Nama Kegiatan**	**Alokasi Anggaran 2017**
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Rp. 7.646,8
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Rp. 12.077,8
5681	Pencegahan dan Penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban	Rp. 5.200,0
3335	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama	Rp. 5.064,0
3336	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per-UU dan Bantuan Hukum	Rp. 54,618,4
Jumlah		Rp. 84.965,0
Terbilang : Delapan puluh empat milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah		

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Sekretaris Jenderal,

Untung Tri Basuki, SH.,SPN
NIP. 195907181986031001

Tembusan :
1. Ketua Komnas HAM;
2. Arsip.

FORMULIR 1

PENJELASAN UMUM

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. VISI : Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan

3. MISI :

1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;
2. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;
3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Prioritas Nasional

Kode	Prioritas Nasional	Alokasi 2017(Juta)
13	Kepastian dan Penegakan Hukum	24.742,6
Jumlah		**24.742,6**

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL	Target 2017	Alokasi 2017(Juta)
01	Terwujudnya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia			24.742,6
		Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undang yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15	
		Persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas	40	
		Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	4	
		Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	1000	
		Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi hak asasi perempuan	2	
02	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya			60.222,4
		Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif	80	
Jumlah				**84.965,0**

6. Program dan Pendanaan

Kode	Program	Indikasi Pendanaan Tahun 2017					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2018	2019	2020
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	60.222,4	0,0	0,0	0,0	60.222,4	72.236,5	86.684,1	104.021,1
06	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	24.742,6	0,0	0,0	0,0	24.742,6	29.691,2	35.629,5	42.765,6

Kode	Program	Indikasi Pendanaan Tahun 2017					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2018	2019	2020
Jumlah		84.965,0	0,0	0,0	0,0	84.965,0	101.927,7	122.313,6	146.786,7

Jakarta, 06 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH., SPN
NIP. 195907181986031001

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Sasaran Strategis K/L : 1.Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

4. Unit Organisasi (Eselon 1) : Komnas HAM

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)
01	Terwujudnya good goveranance			60.222,4
		Nilai penerapan RB Komnas HAM	75	
		Nilai pencapaian kinerja Komnas HAM	CC	
		Persentase penerapan perencanaan berbasis kinerja	75	
Jumlah				**60.222,4**

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2017					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2018	2019	2020
3335	Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama	5.604,0	0,0	0,0	0,0	5.604,0	6.841,8	8.210,1	9.852,1
3336	Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum	54.618,4	0,0	0,0	0,0	54.618,4	65.394,7	78.474,0	94.169,0
Jumlah		**60.222,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60.222,4**	**72.236,5**	**86.684,1**	**104.021,1**

Jakarta,06 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN

NIP:195907181986031001

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terwujudnya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia

3. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

4. Unit Organisasi (Eselon 1) : Komnas HAM

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)
01	saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM			3.188,6
		Jumlah Saran dan rekomendasi mengenai pembentukan perbahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15	
02	Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas			1.455,2
		Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas	40	
03	penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat			6.936,0
		Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	4	
04	Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan			8.037,9
		Jumlah Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	1000	
05	Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi hak asasi perempuan			5.125,0
		Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi hak asasi perempuan	2	
Jumlah				**24.742,6**

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2017					Prakiraan Kebutuhan(Juta)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2018	2019	2020
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	7.464,8	0,0	0,0	0,0	7.464,8	8.957,8	10.749,4	12.899,5
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	12.077,8	0,0	0,0	0,0	12.077,8	14.493,4	17.392,1	20.881,1
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5.200,0	0,0	0,0	0,0	5.200,0	6.240,0	7.488,0	8.985,0
Jumlah		**24.742,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24.742,6**	**29.691,2**	**35.629,5**	**42.765,6**

Jakarta,06 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN
NIP:195907181986031001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya good goveranance

4. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama

5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Pengawasan Internal

6. Output dan Pendanaannya

kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama		7	5.604,0				-----
		Jumlah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman kerja unit kerja lain	7					
		Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja Komnas HAM	2					
		Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal	20					
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	80					
		Persentase tindak lanjut hasil paripurna yang dihasilkan dalam pelaksanaan program	80					
Jumlah				**5.604,0**				

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
001	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama	7		5.604,0	7	7	7	6.841,8	8.210,1	9.852,1
	Penyusunan program dan anggaran komnas ham	3	189,1	567,4						
	Pagu indikatif	3	57,7	173,0						
	Pagu Anggaran	2	40,0	80,0						
	Pagu alokasi anggaran	1	60,0	60,0						
	Pelaksanaan program dan kegiatan	4	47,5	190,0						
	Penyempurnanan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran komnas ham	4	41,3	165,0						
	Monitoring dan evaluasi tahapan perencanaan dan penganggaran	3	31,3	94,0						
	Survey Kepuasan masyarakat	3	31,9	95,6						
	Laporan kinerja Komnas HAM (Lakip)	4	32,9	131,4						
	Laporan Tahunan Komnas HAM (Laptah)	3	65,6	196,9						
	catatan Akhir Tahun (CATAHU)	3	20,7	62,2						
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga	3	141,2	423,7						

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Evaluasi kinerja lembaga	3	45,9	137,8						
	Implementasi sistem pengelolaan data dan informasi	3	30,5	91,5						
	Reviu atas laporan keuangan komnas ham	3	21,7	65,0						
	Reviu RKA Komnas HAM	3	27,7	83,1						
	evaluasi atas implementasi sakip	3	28,2	84,5						
	Monitoring dan rencana tindak lanjut atas temuan bpk	3	23,1	69,2						
	Monitoring penyelesaian kerugian negara	2	14,0	28,0						
	Audit keuangan, kepegawaian dan barang & jasa	3	61,1	183,4						
	Audit program	3	90,6	271,8						
	Sistem informasi pengawasan internal (SPI) dan WBS komnas ham	3	69,2	207,6						
	Penandatanganan MoU dengan stakeholders komnas ham	2	61,4	122,7						
	Tindak lanjut MoU dengan stakeholders dengan perjanjian kerjasama	2	75,3	150,5						
	Evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders	3	51,5	154,4						
	Koordinasi dengan stakeholders terkait kerjasama (kementerian/lembaga, ACHR, ASEAN, ASEAN Community, UJN System, dll)	2	109,4	218,8						
	Penguatan pelayanan kehumasan dan protokol	6	64,1	384,5						
	Pengelolaan tata usaha pimpinan humas dan protokol	4	52,2	208,6						
	Perubahan tata tertib	3	31,5	94,5						
	Pembahasan laporan persidangan hasil putusan sidang paripurna	3	269,6	808,9						
Jumlah				**5.604,0**				**6.841,8**	**8.210,1**	**9.852,1**

B. Sumber Pendanaan

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah
001	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan internal dan kerjasama		5.604,0	0,0	0,0	0,0	5.604,0
	Penyusunan program dan anggaran komnas ham	BLK	567,4	0,0	0,0	0,0	567,4
	Pagu indikatif	BLK	173,0	0,0	0,0	0,0	173,0
	Pagu Anggaran	BLK	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Pagu alokasi anggaran	BLK	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Pelaksanaan program dan kegiatan	BLK	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0
	Penyempurnanan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran komnas ham	BLK	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0
	Monitoring dan evaluasi tahapan perencanaan dan penganggaran	BLK	94,0	0,0	0,0	0,0	94,0
	Survey Kepuasan masyarakat	BLK	95,6	0,0	0,0	0,0	95,6
	Laporan kinerja Komnas HAM (Lakip)	BLK	131,4	0,0	0,0	0,0	131,4
	Laporan Tahunan Komnas HAM (Laptah)	BLK	196,9	0,0	0,0	0,0	196,9
	catatan Akhir Tahun (CATAHU)	BLK	62,2	0,0	0,0	0,0	62,2
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga	BLK	423,7	0,0	0,0	0,0	423,7
	Evaluasi kinerja lembaga	BLK	137,8	0,0	0,0	0,0	137,8
	Implementasi sistem pengelolaan data dan informasi	BLK	91,5	0,0	0,0	0,0	91,5
	Reviu atas laporan keuangan komnas ham	BLK	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
	Reviu RKA Komnas HAM	BLK	83,1	0,0	0,0	0,0	83,1
	evaluasi atas implementasi sakip	BLK	84,5	0,0	0,0	0,0	84,5
	Monitoring dan rencana tindak lanjut atas temuan bpk	BLK	69,2	0,0	0,0	0,0	69,2
	Monitoring penyelesaian kerugian negara	BLK	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0
	Audit keuangan, kepegawaian dan barang & jasa	BLK	183,4	0,0	0,0	0,0	183,4
	Audit program	BLK	271,8	0,0	0,0	0,0	271,8

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah
	Sistem informasi pengawasan internal (SPI) dan WBS komnas ham	BLK	207,6	0,0	0,0	0,0	207,6
	Penandatanganan MoU dengan stakeholders komnas ham	BLK	122,7	0,0	0,0	0,0	122,7
	Tindak lanjut MoU dengan stakeholders dengan perjanjian kerjasama	BLK	150,5	0,0	0,0	0,0	150,5
	Evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders	BLK	154,4	0,0	0,0	0,0	154,4
	Koordinasi dengan stakeholders terkait kerjasama (kementerian/lembaga, ACHR, ASEAN, ASEAN Community, UJN System, dll)	BLK	218,8	0,0	0,0	0,0	218,8
	Penguatan pelayanan kehumasan dan protokol	BLK	384,5	0,0	0,0	0,0	384,5
	Pengelolaan tata usaha pimpinan humas dan protokol	BLK	208,6	0,0	0,0	0,0	208,6
	Perubahan tata tertib	BLK	94,5	0,0	0,0	0,0	94,5
	Pembahasan laporan persidangan hasil putusan sidang paripurna	BLK	808,9	0,0	0,0	0,0	808,9
Jumlah			**5.604,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5.604,0**

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,06 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN
NIP:195907181986031001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

3. Sasaran Program : 1. penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat

2.Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan

4. Kegiatan : Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Biro Dukungan Penegakan HAM

6. Output dan Pendanaannya

kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001	Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat		4	2.800,0	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu	-----
		Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	4					
002	Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan		1000	5.708,7	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Penegakan HAM	-----
		Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L	1000					
		Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan HAM yang akan ditindaklanjuti oleh K/L di perwakilan	24					
003	Terselenggaranya Pengelolaan pengaduan pelanggaran HAM		7500	1.535,8	Kepastian dan Penegakan	Penghormatan, Perlindungan, dan	Penegakan HAM	-----

kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
					Hukum	Pemenuhan hak atas keadilan		
		Jumlah pengelolaan pengaduan yang berindikasi pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	7500					
		Pelaksanaan sistem pengaduan terpadu di perwakilan	6					
004	Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan melalui mekanisme mediasi		75	2.033,3	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Penegakan HAM	-----
		Jumlah pelaksanaan mediasi sengketa pelanggaran hak-hak kelompok marginal dan rentan yang menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi	75					
		Jumlah penanganan konflik sosial melalui upaya mediasi	20					
		Pelaksanaan mediasi kasus HAM di 6 kantor perwakilan Komnas HAM kasus pelanggaran HAM kelompok Marginal dan rentan	12					
Jumlah				12.077,8				

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
001	Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	4		2.800,0	4	4	4	3.360,0	4.032,0	4.848,4
	Penanganan Kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial	1	1.680,0	1.680,0						
	Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non judisial (pelanggaran HAM yang berat masa lalu)	1	1.120,0	1.120,0						
002	Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	1000		5.708,7	1000	1000	1000	6.850,5	8.220,6	9.864,7
	Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM	9	371,0	3.338,7						
	Penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual dan nasional di indonesia	2	885,0	1.770,0						
	Pemantauan dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM oleh 6 kantor perwakilan Komnas HAM	1	600,0	600,0						
003	Terselenggaranya Pengelolaan pengaduan pelanggaran HAM	7500		1.535,8	7500	7500	7500	1.842,9	2.211,5	2.654,0

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Penerimaan pengaduan pelanggaran HAM secara langsung dan online	8	167,5	1.340,3						
	Evaluasi dan Laporan Penanganan Pengaduan	1	15,4	15,4						
	Pengelolaan pengaduan di perwakilan	2	90,0	180,0						
004	Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan melalui mekanisme mediasi	75		2.033,3	75	75	75	2.440,0	2.928,0	3.514,0
	Pelaksanaan Mediasi penyelesaian kasus-kasus HAM hak-hak kelompok marginal dan rentan	3	258,4	775,2						
	Mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM di 6 (enam) perwakilan	1	186,9	186,9						
	Koordinasi dengan subkomisi, sekretariat Komnas HAM dan stakeholders dalam penanganan kasus-kasus mediasi	1	87,5	87,5						
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mediasi	2	82,9	165,8						
	Penyelesaian konflik sosial melalui proses mediasi	3	142,6	427,9						
	Pencegahan konflik sosial	1	0,0	0,0						
	Mediasi kasus HAM serta koordinasi dan supervisi pelaksanaan mediasi di 6 (enam) kantor perwakilan	2	195,0	390,0						
Jumlah				12.077,8				14.493,4	17.392,1	20.881,1

B. Sumber Pendanaan

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah
001	Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat		2.800,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0
	Penanganan Kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme judisial	BLK	1.680,0	0,0	0,0	0,0	1.680,0
	Penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non judisial (pelanggaran HAM yang berat masa lalu)	BLK	1.120,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0
002	Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan		5.708,7	0,0	0,0	0,0	5.708,7
	Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM	BLK	3.338,7	0,0	0,0	0,0	3.338,7
	Penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual dan nasional di indonesia	BLK	1.770,0	0,0	0,0	0,0	1.770,0
	Pemantauan dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM oleh 6 kantor perwakilan Komnas HAM	BLK	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
003	Terselenggaranya Pengelolaan pengaduan pelanggaran HAM		1.535,8	0,0	0,0	0,0	1.535,8
	Penerimaan pengaduan pelanggaran HAM secara langsung dan online	BLK	1.340,3	0,0	0,0	0,0	1.340,3
	Evaluasi dan Laporan Penanganan Pengaduan	BLK	15,4	0,0	0,0	0,0	15,4

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah
	Pengelolaan pengaduan di perwakilan	BLK	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
004	Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan melalui mekanisme mediasi		2.033,3	0,0	0,0	0,0	2.033,3
	Pelaksanaan Mediasi penyelesaian kasus-kasus HAM hak-hak kelompok marginal dan rentan	BLK	775,2	0,0	0,0	0,0	775,2
	Mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM di 6 (enam) perwakilan	BLK	186,9	0,0	0,0	0,0	186,9
	Koordinasi dengan subkomisi, sekretariat Komnas HAM dan stakeholders dalam penanganan kasus-kasus mediasi	BLK	87,5	0,0	0,0	0,0	87,5
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mediasi	BLK	165,8	0,0	0,0	0,0	165,8
	Penyelesaian konflik sosial melalui proses mediasi	BLK	427,9	0,0	0,0	0,0	427,9
	Pencegahan konflik sosial	BLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mediasi kasus HAM serta koordinasi dan supervisi pelaksanaan mediasi di 6 (enam) kantor perwakilan	BLK	390,0	0,0	0,0	0,0	390,0
Jumlah			**12.077,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12.077,8**

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,21 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,S.PN

NIP:195907181986031001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya good goveranance

4. Kegiatan : Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum

5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Biro Umum

6. Output dan Pendanaannya

kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001	Terselenggaranya RB Komnas HAM		75	2.622,5				-----
		Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	75					
994	Layanan Perkantoran		13	51.995,9				-----
		Belanja Pegawai	13					
		Belanja Barang Operasional	13					
Jumlah				**54.618,4**				

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
001	Terselenggaranya RB Komnas HAM	75		2.622,5	80	85	90	3.000,0	3.600,0	4.320,0
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	80	3,1	250,0						
	Peraturan kelembagaan yang dihasilkan	3	116,7	350,0						
	Konsultasi dan Bantuan Hukum yang dihasilkan	1	80,0	80,0						
	Koordinasi peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur (penataan sistem manajemen SDM)	6	127,1	762,5						
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai Komnas HAM	30	15,0	450,0						
	Dokumen Keuangan yang berkualitas	5	78,0	390,0						
	Laporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	340,0	340,0						
994	Layanan Perkantoran	13		51.995,9	13	13	13	62.394,7	74.874,0	89.849,0
	Gaji dan tunjangan	13	1.942,6	25.254,3						
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	13	2.057,0	26.741,6						
Jumlah				**54.618,4**				**65.394,7**	**78.474,0**	**94.169,0**

B. Sumber Pendanaan

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah
001	Terselenggaranya RB Komnas HAM		2.622,5	0,0	0,0	0,0	2.622,5
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	BLK	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah
	Peraturan kelembagaan yang dihasilkan	BLK	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Konsultasi dan Bantuan Hukum yang dihasilkan	BLK	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Koordinasi peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur (penataan sistem manajemen SDM)	BLK	762,5	0,0	0,0	0,0	762,5
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai Komnas HAM	BLK	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
	Dokumen Keuangan yang berkualitas	BLK	390,0	0,0	0,0	0,0	390,0
	Laporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BLK	340,0	0,0	0,0	0,0	340,0
994	Layanan Perkantoran		51.995,9	0,0	0,0	0,0	51.995,9
	Gaji dan tunjangan	BLK	25.254,3	0,0	0,0	0,0	25.254,3
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	BLK	26.741,6	0,0	0,0	0,0	26.741,6
Jumlah			**54.618,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54.618,4**

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 06 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN
NIP.195907181986031001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

3. Sasaran Program :
1.saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM

2.Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas

3. penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat

4.Penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan

4. Kegiatan : Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara

5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Biro Dukungan Pemajuan HAM

6. Output dan Pendanaannya

kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001	Saran dan Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM		15	3.113,6	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Pendidikan HAM bagi Apgakum	-----
		Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per-UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15					
		Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabut8an per-UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM di Perwakilan	6					
002	Indikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan polisi berbasis HAM dan pemenuhan Hak kelompok minoritas		40	1.455,2	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Pendidikan HAM bagi Apgakum	-----
		Persentase inidikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan polisi berbasis HAM dan pemenuhan Hak kelompok minoritas	40					
003	K/L/D/stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM		40	566,9	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Pendidikan HAM bagi Apgakum	-----
		Persentase K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM	40					
004	K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan desiminasi HAM		40	2.329,1	Kepastian dan Penegakan	Penghormatan, Perlindungan, dan	Pendidikan HAM bagi Apgakum	-----

kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
					Hukum	Pemenuhan hak atas keadilan		
		Persentase K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan desiminasi HAM	40					
		Desiminasi HAM oleh Perwakilan Komnas HAM	6					
		Monitoring dan evaluasi penguatan kesdaran HAM masyarakat dan aparatur Negara	1					
Jumlah				7.464,8				

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
001	Saran dan Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15		3.113,6	15	15	15	3.736,3	4.483,6	5.380,3
	Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perUUan yang berperspektif HAM	10	107,3	1.073,0						
	Hasil Kajian dan Penelitian mengenai kelompok marjinal dan rentan	4	265,4	1.061,7						
	Dokumen Indeks HAM	3	145,0	435,0						
	Monitoring dan Evaluasi saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per-UU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM	1	43,9	43,9						
	Kajian peraturan/ kebijakan daerah di 4 (empat) wilayah perwakilan Komnas HAM	6	83,3	500,0						
002	Indikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan polisi berbasis HAM dan pemenuhan Hak kelompok minoritas	40		1.455,2	40	40	40	1.746,2	2.095,4	2.514,5
	Peningkatan kapasitas anggota polisi dalam pelaksanaan pilot project Polisi Berbasis HAM	9	57,8	520,0						
	Peningkatan kapasitas sekolah untuk menerapkan pedoman Sekolah Ramah HAM	9	54,1	487,3						
	Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat tentang HRC	8	39,5	315,6						
	Adanya pemahaman bagi aparatur negara tentang isu minoritas	3	44,1	132,3						
003	K/L/D/stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM	40		566,9	40	40	40	680,3	816,4	979,7
	Peningkatan penyebarluasan HAM melalui kerjasama dengan K/L/D/ Stakeholders	42	10,3	431,4						
	Monitoring dan Evaluasi terhadap K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM	3	45,2	135,5						
004	K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan desiminasi HAM	40		2.329,1	40	40	40	2.795,0	3.354,0	4.025,0
	Diseminasi isu-isu aktual pada anggota kepolisian	3	41,6	124,7						
	Diseminasi Sekolah Ramah HAM pada sekolah-sekolah di berbagai wilayah pada tingkat SMA	3	39,9	119,6						
	Diseminasi HRC pada aparatur negara	3	43,0	129,1						
	Diseminasi isu minoritas pada aparatur negara	3	43,0	129,1						
	Penyebarluasan wawasan dan nilai-nilai HAM melalui Penerbitan, Perpustakaan, Teknologi Informasi dan kampanye/publikasi HAM	49	25,3	1.241,0						
	Kampanye Nasional HAM	3	45,2	135,5						
	Kampanye Nasional HAM untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kelompok Marjinal dan Rentan	7	42,9	300,0						

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
	(Rangkaian Hari HAM Internasional)									
	Desiminasi HAM oleh perwakilan Komnas HAM	6	25,0	150,0						
Jumlah				**7.464,8**				**8.957,8**	**10.749,4**	**12.899,5**

B. Sumber Pendanaan

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah
001	Saran dan Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM		3.113,6	0,0	0,0	0,0	3.113,6
	Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perUUan yang berperspektif HAM	BLK	1.073,0	0,0	0,0	0,0	1.073,0
	Hasil Kajian dan Penelitian mengenai kelompok marjinal dan rentan	BLK	1.061,7	0,0	0,0	0,0	1.061,7
	Dokumen Indeks HAM	BLK	435,0	0,0	0,0	0,0	435,0
	Monitoring dan Evaluasi saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per-UU yang berspektif HAM dan isu lain terkait HAM	BLK	43,9	0,0	0,0	0,0	43,9
	Kajian peraturan/kebijakan daerah di 4 (empat) wilayah perwakilan Komnas HAM	BLK	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
002	Indikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan polisi berbasis HAM dan pemenuhan Hak kelompok minoritas		1.455,2	0,0	0,0	0,0	1.455,2
	Peningkatan kapasitas anggota polisi dalam pelaksanaan pilot project Polisi Berbasis HAM	BLK	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0
	Peningkatan kapasitas sekolah untuk menerapkan pedoman Sekolah Ramah HAM	BLK	487,3	0,0	0,0	0,0	487,3
	Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat tentang HRC	BLK	315,6	0,0	0,0	0,0	315,6
	Adanya pemahaman bagi aparatur negara tentang isu minoritas	BLK	132,3	0,0	0,0	0,0	132,3
003	K/L/D/stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM		566,9	0,0	0,0	0,0	566,9
	Peningkatan penyebarluasan HAM melalui kerjasama dengan K/L/D/ Stakeholders	BLK	431,4	0,0	0,0	0,0	431,4
	Monitoring dan Evaluasi terhadap K/L/D/Stakeholders yang telah melaksanakan pendidikan berbasis HAM	BLK	135,5	0,0	0,0	0,0	135,5
004	K/L/D/Stakeholders yang telah mendapatkan desiminasi HAM		2.329,1	0,0	0,0	0,0	2.329,1
	Diseminasi isu-isu aktual pada anggota kepolisian	BLK	124,7	0,0	0,0	0,0	124,7
	Diseminasi Sekolah Ramah HAM pada sekolah-sekolah di berbagai wilayah pada tingkat SMA	BLK	119,6	0,0	0,0	0,0	119,6
	Diseminasi HRC pada aparatur negara	BLK	129,1	0,0	0,0	0,0	129,1
	Diseminasi isu minoritas pada aparatur negara	BLK	129,1	0,0	0,0	0,0	129,1
	Penyebarluasan wawasan dan nilai-nilai HAM melalui Penerbitan, Perpustakaan, Teknologi Informasi dan kampanye/publikasi HAM	BLK	1.241,0	0,0	0,0	0,0	1.241,0
	Kampanye Nasional HAM	BLK	135,5	0,0	0,0	0,0	135,5
	Kampanye Nasional HAM untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kelompok Marjinal dan Rentan (Rangkaian Hari HAM Internasional)	BLK	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Desiminasi HAM oleh perwakilan Komnas HAM	BLK	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Jumlah			**7.464,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7.464,8**

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,06 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN
NIP:195907181986031001

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2. Program : Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

3. Sasaran Program : 1.Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi hak asasi perempuan

2.saran dan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM

4. Kegiatan : Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Biro Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

6. Output dan Pendanaannya

kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001	Meningkatnya mekanisme yang memudahkan perempuan korban kekerasan untuk mengakses hak-haknya atas inisiatif Negara maupun masyarakat		2	2.200,0	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-----
		Pengembangan Konsep penanganan Korban KtP	2					
002	Meningkatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang melindungi Hak asasi Perempuan, termasuk mekanisme pengujian dan perbaikan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah		2	1.900,0	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-----
		Jumlah rekomendasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan, dan penanggulangan segala bentuk KtP dan pemenuhan Hak korban yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait baik negara atau masyarakat	2					
003	Menguatnya peran aktif masyarakat dalam memantau, mencegah dan menangani kasus-kasus KtP, termasuk mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM		1	575,0	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-----
		Jumlah peningkatan peran dan kerjasama organisasi/kelompok masyarakat/agama/adat dalam pemantauan, pencegahan, dan penanganan KtP, termasuk mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	1					
004	Menguatkan peran KP sebagai rujukan pengetahuan, dan resource centre tentang HAM perempuan dan KtP		10	450,0	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-----
		Jumlah pengguna layanan yang mendapatkan manfaat	10					

kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
		dari informasi dan/atau pengetahuan mengenai KtP						
005	Meningkatkan dukungan negara, publik dan korban tentang Komnas Perempuan sebagai LNHAM dengan mandat spesifik dan peran strategisnya regional dan internasional		1	75,0	Kepastian dan Penegakan Hukum	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-----
		Jumlah partisipasi KP dalam forum strategis baik ditingkat lokal, nasional , regional dan internasional	1					
Jumlah				**5.200,0**				

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
001	Meningkatnya mekanisme yang memudahkan perempuan korban kekerasan untuk mengakses hak-haknya atas inisiatif Negara maupun masyarakat	2		2.200,0	2	2	2	2.640,0	3.168,0	3.801,0
	Pengembangan dan Pemantauan pelaksanaan SPPT-PKKTP	1	100,0	100,0						
	Pengembangan kebijakan penanganan KtP di institusi keagaaam dan kemasyarakatan lainnya	1	0,0	0,0						
	Pengembangan kurikulum pendidikan yang berperspektif HAM dan Gender	1	0,0	0,0						
	Pengembangan konsep (road map) dan pelaksanaan memorialisasi pelanggaran HAM di masa lalu	1	500,0	500,0						
	Penyusunan road map penanganan KtP jangka panjang (20 tahun)	1	300,0	300,0						
	Pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan kelompok rentan korban KtP	1	600,0	600,0						
	Pengembangan sistem perlindungan perempuan pembela HAM	1	467,8	467,8						
	Penguatan konsep mekanisme dan sistem lembaga nasional HAM	1	232,2	232,2						
002	Meningkatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang melindungi Hak asasi Perempuan, termasuk mekanisme pengujian dan perbaikan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah	2		1.900,0	2	2	2	2.280,0	2.736,0	3.283,2
	Rekomendasi atas pelanggaran HAM perempuan dan kekerasan terhadap perempuan	4	350,0	1.400,0						
	Rekomendasi atas kajian KtP dalam berbagai konteks	33	3,0	100,0						
	Monev implementasi rekomendasi (sidang HAM, Forum RPJM, Konsultasi publik)	5	80,0	400,0						
003	Menguatnya peran aktif masyarakat dalam memantau, mencegah dan menangani kasus-kasus KtP, termasuk mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	1		575,0	1	1	1	690,0	828,0	993,6
	Inisiatif kampanye	1	75,0	75,0						
	Inisiatif integrasi dalam program	3	166,7	500,0						
004	Menguatkan peran KP sebagai rujukan pengetahuan, dan resource centre tentang HAM perempuan dan KtP	10		450,0	10	10	10	540,0	648,0	777,6
	Pengembangan RC dan Knowledge management	3	150,0	450,0						
	Penggunaan informasi dan/ atau pengetahuan KP dalam media	1	0,0	0,0						
005	Meningkatkan dukungan negara, publik dan korban tentang Komnas Perempuan sebagai LNHAM dengan mandat spesifik dan peran strategisnya regional dan internasional	1		75,0	1	1	1	90,0	108,0	129,6
	Pelaporan mekanisme regional dan internasional	1	0,0	0,0						
	Dialog kebijakan	1	0,0	0,0						
	Konsultasi berkala mitra strategis	6	12,5	75,0						

kode	Output/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		volume/target	Satuan Biaya	Alokasi (Juta)	Volume/Target			Alokasi (Juta)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jumlah				5.200,0				6.240,0	7.488,0	8.985,0

B. Sumber Pendanaan

Kode	Output/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)				
			Rupiah	PHLN + PDN	PNBP + BLU	SBSN	Jumlah
001	Meningkatnya mekanisme yang memudahkan perempuan korban kekerasan untuk mengakses hak-haknya atas inisiatif Negara maupun masyarakat		2.200,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0
	Pengembangan dan Pemantauan pelaksanaan SPPT-PKKTP	BLK	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Pengembangan kebijakan penanganan KtP di institusi keagaaam dan kemasyarakatan lainnya	BLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pengembangan kurikulum pendidikan yang berperspektif HAM dan Gender	BLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pengembangan konsep (road map) dan pelaksanaan memorialisasi pelanggaran HAM di masa lalu	BLK	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Penyusunan road map penanganan KtP jangka panjang (20 tahun)	BLK	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan kelompok rentan korban KtP	BLK	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
	Pengembangan sistem perlindungan perempuan pembela HAM	BLK	467,8	0,0	0,0	0,0	467,8
	Penguatan konsep mekanisme dan sistem lembaga nasional HAM	BLK	232,2	0,0	0,0	0,0	232,2
002	Meningkatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang melindungi Hak asasi Perempuan, termasuk mekanisme pengujian dan perbaikan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah		1.900,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0
	Rekomendasi atas pelanggaran HAM perempuan dan kekerasan terhadap perempuan	BLK	1.400,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
	Rekomendasi atas kajian KtP dalam berbagai konteks	BLK	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Monev implementasi rekomendasi (sidang HAM, Forum RPJM, Konsultasi publik)	BLK	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
003	Menguatnya peran aktif masyarakat dalam memantau, mencegah dan menangani kasus-kasus KtP, termasuk mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM		575,0	0,0	0,0	0,0	575,0
	Inisiatif kampanye	BLK	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	Inisiatif integrasi dalam program	BLK	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
004	Menguatkan peran KP sebagai rujukan pengetahuan, dan resource centre tentang HAM perempuan dan KtP		450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
	Pengembangan RC dan Knowledge management	BLK	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
	Penggunaan informasi dan/ atau pengetahuan KP dalam media	BLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
005	Meningkatkan dukungan negara, publik dan korban tentang Komnas Perempuan sebagai LNHAM dengan mandat spesifik dan peran strategisnya regional dan internasional		75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	Pelaporan mekanisme regional dan internasional	BLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dialog kebijakan	BLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Konsultasi berkala mitra strategis	BLK	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Jumlah			5.200,0	0,0	0,0	0,0	5.200,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,06 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
SEKRETARIS JENDERAL

UNTUNG TRI BASUKI, SH.,SPN
NIP:195907181986031001